

BAB III

KONDISI BANTEN TAHUN 1677-1682 M

A. Kondisi Geografis.

Pembangunan Banten sebagai Negara-Kota (*city state*) sekaligus sebagai Kota-Bandar (*harbour city*) dilakukan sejak Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kebesaran Kesultanan Banten pada masa itu ditunjang oleh beberapa faktor, diantaranya adalah letak geografis yang strategis, kondisi lingkungan yang menguntungkan, struktur masyarakat, dan pemerintahan yang kuat.¹

Ketika berdiri menjadi sebuah pemerintahan Kesultanan Islam, wilayah taklukan Kesultanan Banten mencakup daerah yang luas di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera, diantaranya adalah Jayakarta, Karawang, Lampung, dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Selatan.² Ekspansi berlanjut hingga pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Cirebon, Sumedang, Indramayu, Karawang, Pamanukan, Ciasem, dan Tegal.³

Secara historis, Kesultanan Banten telah dikenal sejak masa Kerajaan Hindu-Sunda memiliki peran dalam menunjang perekonomian, karena merupakan pusat perdagangan yang bersifat nasional dan internasional.⁴ Terdapat enam bandar perdagangan di kerajaan Sunda; yaitu Karangantu, Sunda Kelapa, Pontang, Cigede, Tanara, dan Cimanuk.⁵ Melalui Bandar-bandar tersebut berbagai sumber daya yang dihasilkan di kawasan pedalaman

¹ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka Budaya Banten*, (Serang: BP3S, 2005) P. 82

² Nina Lubis, *Sejarah Banten: Membangun Tradisi dan Peradaban* (Banten: BPAD Provinsi Banten, 2014) P. 37

³ Mufti Ali, *Aria Wangsakara Tangerang, Imam Kesultanan Banten, Ulama-Pejuang Anti Kolonialisme (1615-1681)*, (Pandeglang: Bhakti Banten Press, 2019) P. 79

⁴ Ikot Sholehah, *Perdagangan Internasional Kesultanan Banten Akhir Abad XVI-XVII*, Tesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), P. 53

⁵ Armando Cortesao, *The Suma Oriental*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015) P.238

disalurkan ke penjurur dunia. Karena alasan keadaan geografis itulah, Kesultanan Banten menjadi wilayah yang menarik untuk dikunjungi oleh para saudagar maupun dari ahli agama baik dari kawasan Nusantara maupun dari luar negeri.⁶

Guillot juga memberikan penafsiran dari hasil pengamatannya tentang letak geografis Banten pada peta tahun 1659. Guillot menggambarkan bahwa terdapat sungai yang melintasi Kota Banten, yang tak lain adalah Sungai Cibanten yang bercabang dua dan mengalir ke laut. Kedua muara ini membentuk dua pelabuhan serta membagi kota ini menjadi tiga bagian dengan luas yang berbeda-beda. Kota yang berada di bagian tengah delta adalah pusat kota raja, di bagian barat adalah kawasan orang Tionghoa (Pacinan), dan di sebelah timur adalah pasar besar dan perkampungan.⁷

Orientasi ruang Kota Banten tampak di tunjukkan oleh penataan empat jalan utama (kanal-kanal) mengikuti titik kardinal⁸ yang mengarah ke semua tempat, sehingga membentuk persilangan dengan titik pusatnya yaitu kraton. Hal itu diperkuat lagi dengan dengan tembok keliling kota berdenah empat persegi panjang yang pada kedua sudut luarnya berujung pada Pelabuhan. Dengan denah kota seperti itu, Guillot mengusulkan untuk melihat Banten sebagaimana halnya *mandala*; sebuah pusat dengan keempat titik kardinal yang bahkan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, setiap titik sudut itu secara simbolis dijaga oleh empat pejabat (penguasa), yaitu Pangeran Kidul, Pangeran Lor, Pangeran Wetan dan Pangeran Kulon.⁹

Seperti kota-kota lain yang sejaman di Pulau Jawa, terdapat pembagian ruang yang berbeda untuk pemukiman pribumi dan pemukiman orang asing.

⁶ Ikot Sholehah, *Perdagangan Internasional*, ..., P.53

⁷ Claude Guillot, *Banten Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008) P. 66

⁸ Titik cardinal / Cardinal Points memiliki arti arah mata angin yang merupakan empat titik utama kompas. Diantaranya adalah utara, selatan, timur, dan barat. Dikutip dari Caitlin Dempsey, *Cardinal Directions and Ordinal Directions*, <https://www.geographyrealm.com/cardinal-ordinal-directions/>, 22 juli 2013 (diakses pada 15 Juni 2021)

⁹ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka...*, P 10-11

Pemisahan ruang itu di tegaskan oleh tembok (dinding) kota yang melindungi bagian dalam kota. Sementara di bagian luar tembok terdapat kelompok-kelompok pemukiman para pedagang dengan fasilitas administrasi kepelabuhan dan juga pasar besar. Pemukiman Kota Banten pada saat itu terbagi menjadi pemukiman *intra-muros* (dalam benteng) dan pemukiman *extra muros* (luar benteng).¹⁰

Pemukiman yang merupakan bagian dari *intra-muros* (dalam benteng) diantaranya adalah:

1. Keraton Surosowan, yang berada di sebelah selatan alun-alun.
2. Alun-alun keraton yang terletak di sebelah utara istana dengan bentuk memanjang sampai ke kanal yang melintasi kompleks istana.
3. Masjid Agung dan Menara terletak di sebelah barat alun-alun
4. Sabakingking, Nekropolis atau makam raja Banten yang letaknya di sekitar area masjid. Pada tahun 1678, hanya ada dua orang yang dimakamkan disana yaitu Maulana Hasanuddin dan cucunya Maulana Muhammad, sedangkan raja-raja lainnya dimakamkan di Kenari, dekat Tamansari
5. Kapalembangan (pasar dalam kota) yang terletak antara masjid dan sungai. Disebut kapalembangan karna tempat itu dijadikan sebagai pasar pertama di Kota Banten. Tetapi dalam perkembangannya, pasar itu tidak representatif lagi karna ketiadaan ruang yang cukup sesuai dengan kenaikan populasi dan membesarnya aktifitas perdagangan di dalam kota. Ketika orang Belanda pertama datang ke Banten tahun 1596, pasar utama sudah dipindahkan di sebelah sisi timur laut benteng kota sekitar Karangantu, sedangkan pasar yang terletak di dekat masjid hanya buka pada pagi hari.
6. Perkampungan dalam benteng (pemukiman pribumi)

¹⁰ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka...*, P.9

7. Krapyak yaitu kandang ternak dan Tamansari atau taman air, dua tempat ini dalam Sejarah Banten sesungguhnya berada di luar benteng kota, tepatnya di sebelah barat daya Kota Banten. Namun kepentingan dua tempat ini terletak pada fungsinya bagi kebutuhan pemenuhan pangan dan air penduduk kota. Juga ada sebuah tempat bernama *Pupungkuran* dekat Kenari sekarang. Tempat ini berkenaan dengan kompleks yang di sebut dengan Tasikardi yang merupakan daerah untuk penampungan air untuk keraton yang dihubungkan dengan *Pangindelan* dan pipa air yang masih bisa kita lihat seperti sekarang.¹¹

Sedangkan pemukiman di *extra muros* (luar benteng) diantaranya adalah:

1. Pabean dan Pelabuhan internasional, letaknya sering di sebut-sebut sumber barat berada di sekitar Pacinan, dan di area ini banyak di bangun loji-loji Eropa
2. Karangantu, pelabuhan lokal, dan kampung pinggiran. Perkampungan disini dihuni oleh orang-orang asing terutama komunitas Cina dan India.
3. Kawasan pertanian di pedalaman selatan.¹²

Kota Banten pada akhir abad XVI seperti digambarkan pada peta tanpa skala itu sukar dipastikan luas daerahnya. Berita orang Belanda tahun 1596 hanya mengatakan kira-kira sama dengan Amsterdam lama. Pada tahun 1651-1683 sumber asing menggambarkannya hampir sama dengan Kota Belanda kecil dengan rumah-rumah yang disusun rapih sepanjang kanal.¹³ Sedangkan pada tahun 1678 luas Kota Banten kira-kira 1 mil. Menurut Francois Valentijn (dalam Ikot Sholehat 2019:56) “kota tersebut panjangnya 2 mil Inggris tetapi katanya kini (1694) tidak demikian mungkin karena pernah terbakar pada tahun 1682”. Pendapat Messe seperti yang dikuti dalam Ikot Sholehat, mengatakan

¹¹ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka...*, P.11-15

¹² Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka...*, P. 15

¹³ Bernard. H.M. Vlekke, *Nusantara, Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2016) P. 165

bahwa “pada tahun 1683 Kota Banten luasnya lebih daripada Batavia”. Valentijn mengatakan bahwa pada tahun 1694, panjangnya kota di pesisir kurang dari ¼ mil.¹⁴

Mengenai daerah-daerah yang kosong di Banten, Sumber-sumber baik Eropa maupun Banten semuanya memberikan kesan yang sama, yakni adanya ketidakseimbangan yang besar dalam persebaran penduduk di kesultananan.¹⁵ Populasi lebih terkonsentrasi di Banten sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan. Di luar ibukota, hanya ada tiga kota utama yaitu Pontang, Tanara, dan Tangerang, sedangkan yang lainnya hanya berupa dusun saja.¹⁶ Guillot juga menjelaskan bahwa di luar ibukota, tidak terdapat kota yang betul-betul dapat di sebut kota, selain di 3 daerah pemukiman besar tersebut. Semuanya mengandung kesimpulan bahwa selain Pelabuhan, wilayah banten tidak banyak penduduknya.

Guillot juga memberi penjelasan mengenai wilayah pegunungan yang terletak di bagian selatan yang luasnya diperkirakan lebih dari setengah wilayah Banten. Bahwasannya daerah yang sangat luas ini tidak dihuni kecuali hanya sebagai tempat melarikan diri dari para penguasa. Kemudian dalam menangani masalah populasi yang semakin membengkak di Banten, Sultan mengadakan pemukiman baru untuk para pecandu dan kelompok-kelompok Bugis-Makasar dengan paksa di kawasan-kawasan baru dan kosong ini. Warga negara yang tidak diinginkan, dihukum ke daerah-daerah yang keadaannya sulit dengan tujuan untuk memaksa mereka melakukan pekerjaan berat mengolah tanah-tanah untuk pertama kalinya. Fenomena yang dijumpai di Banten ini tampaknya lebih merupakan pemikiran untuk melakukan rehabilitasi mealui kegiatan pertanian yang banyak dilakukan di Asia, dan tentunya dalam rangka merealisasikan proyek sultan dalam menyeimbangkan populasi penduduk.¹⁷

¹⁴ Ikot Sholehah, *Perdagangan Internasional*, ..., P. 56

¹⁵ Claude Guillot, *Banten Sejarah dan peradaban...*, P.175

¹⁶ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka...*, P. 24

¹⁷ Claude Guillot, *Banten Sejarah dan peradaban...*, P 172

B. Kondisi Sosial

Letaknya yang strategis, telah menjadikan Kesultanan Banten sebagai salah satu bandar internasional yang berpengaruh di Nusantara baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama.¹⁸ Pada akhir abad ke-16, dan awal abad ke-17, Meningkatnya faktor perdagangan menyebabkan banyak pedagang dari berbagai negeri berdatangan, dan menjadikan Banten sebagai daerah multietnis dengan kultur yang beragam.¹⁹

Kedatangan para pedagang itu menjadikan Banten menjadi daerah yang padat penduduk. Pada tahun 1670, Banten diperkirakan memiliki 150.000an penduduk.²⁰ yang diperkirakan setara dengan populasi di Amsterdam, Roma, dan Seoul pada masa yang sama.²¹ Tak hanya didominasi oleh kaum pedagang, pada tahun 1670 itu Banten menjadi semakin padat penduduk karena kedatangan pengungsi yang datang dari berbagai wilayah diantaranya pantai Utara Jawa karena perang tahta di Mataram, dari daratan Cina Selatan yang mengalami perang sipil, serta penempatan kelompok-kelompok Bugis, Makassar, Madura, dan Bali yang terdiri dari para bekas prajurit dalam semua konflik di daerahnya.²²

Anthony Reid memiliki perbandingan terkait populasi jiwa yang hidup di Banten. Reid menyebut bahwa pada tahun 1673-1674, Banten mengalami peningkatan ratusan ribu penduduk. Pada tahun itu, ia mencatat populasi kota mencapai angka 700-800 ribu jiwa. Data demografis itu tentu menjadi masalah

¹⁸ Denna Ritonga, *Nilai Toleransi peninggalan Kesultanan Banten*, (Serang, LP2M, 2015) P. 33

¹⁹ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya*, Jaringan Asia, Jilid II. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), P. 55

²⁰ Bernard Dorleans, *Orang Indonesia dan Orang Prancis Dari Abad XVI – Abad XX*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), P.112

²¹ Ahmad Tarmidzi Alkhudri, dkk, “Metamorfosis Gerakan Sosial di Banten: Dari Romantisme Identitas Ke Isu Agraria Lingkungan”, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol.6, No.1 (April 2018), P. 24.

²² Juliadi, *Ragam Pusaka Budaya ...*, P. 25

sosial yang besar dan harus segera dicari solusinya oleh Sultan Ageng dengan kebijakannya guna menyeimbangkan kembali populasi penduduk yang ada.²³

Kehidupan sosial masyarakat Banten memiliki landasan yang mengacu pada ajaran-ajaran yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kehidupan masyarakatnya teratur. Banten berusaha mengislamkan seluruh wilayah Pajajaran, bahkan penyebaran Agama Islam meluas sampai ke Lampung, Bengkulu, dan daerah-daerah lainnya di sekitar Tulangbawang.²⁴ Meskipun begitu, Sultan tetap menerima perbedaan agama yang ada di negaranya, baik orang asing pendatang yang beragama non muslim,²⁵ maupun pribumi Banten yang masih memepertahankan kepercayaan lamanya seperti Suku Baduy yang menghuni wilayah khusus di bagian selatan.²⁶ Orang Eropa juga diizinkan memiliki sebuah kapel kecil atau tempat berdoa dalam loji mereka masing-masing, dan masing-masing kompeni biasanya juga mendatangkan agamawan bagi mereka. Sebagian besar orang Tionghoa juga banyak yang masih menganut agama leluhur mereka.²⁷ Kebijakan yang fleksibel, ilmu pengetahuan, dan aktivitas keagamaan yang berkembang menjadi pertanda dari kearifan sultan.²⁸

Dalam bidang stratifikasi sosial, masyarakat Kesultanan Banten terbagi atas beberapa golongan, yaitu: golongan sultan dan keluarganya, golongan elit, golongan non elit dan golongan budak. Jika diuraikan dengan lebih detil, golongan pertama terdiri dari sultan sebagai penguasa dan keluarganya. Golongan kedua, yaitu golongan elit, yang dikategorikan sebagai pejabat tinggi kesultanan seperti menteri, mangkubumi, kadi, senopati, laksamana, syahbandar dan lainnya. Golongan bangsawan yang masih merupakan

²³ Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga*, Jilid II (Jakarta: Yayasan Obor, 2011) P. 85

²⁴ Denna Ritonga, *Nilai Toleransi ...*, P. 34

²⁵ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya* Jilid II..., P.56

²⁶ Nina. H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), P. 123

²⁷ Claude Guillot, *Banten Sejarah dan peradaban ...*, P. 97

²⁸ Ikot Sholehah, *Perdagangan Internasional, ...*, P. 53

keluarga sultan banyak pula yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, kedua golongan ini merupakan lapisan masyarakat yang jumlahnya terbatas. Hal ini berbeda dengan lapisan yang disebut non elit, jumlahnya terbanyak dan terdiri atas rakyat yang kebanyakan berprofesi sebagai petani, pedagang, tukang, nelayan dan sebagainya. Sedangkan golongan budak adalah golongan yang tidak mempunyai kebebasan diri sendiri, yang keberadaannya disebabkan karena tawanan perang, terjebak hutang, atau penyebab lainnya.²⁹

Meskipun ada sekat stratifikasi sosial di Kesultanan Banten, namun hubungan antara sultan sebagai penguasa dengan rakyatnya memiliki hubungan yang cukup dekat, dalam hal ini dimaksudkan dengan golongan non elit.³⁰ Hal tersebut diuraikan dalam Sejarah Banten Pupuh XLV yang menceritakan bahwa:

Pada musim hujan dan musim peralihan, sultan jarang menerima sembah. Para Menteri dan Ponggawa pada waktu itu berada di sawah. Jika sultan mendengar orang sakit, dikirimnya gula geseng dan gula ngemu dengan uang untuk mereka yang sakit itu. Apabila sultan menerima sembah, maka tak seorang pun boleh kena panas matahari. Apabila tidak ada tempat maka orang pun harus berusaha duduk untuk lebih dekat kepadanya.³¹

Status sosial yang dimiliki oleh seseorang, akan mempengaruhi peran dan caranya untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti halnya Sultan yang tidak semua golongan bisa berinteraksi langsung dengannya. Selain itu, hal ini juga terlihat dari toponimi tempat tinggal oleh masyarakat yang terkelompokkan dalam pola pemukiman yang berkelompok berdasarkan oleh status sosial yang dimiliki, toponimi tersebut adalah:

- a. *Kawangsaan* adalah tempat tinggal Pangeran Wangsa.

²⁹ Heriyanti Ongkodharma Untoro, *Kapitalisme Pribumi Awal: Kesultanan Banten 1522-1684 Kajian Arkeologi Ekonomi*, (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007), P. 27

³⁰ Untoro, *Kapitalisme Pribumi Awal... P. 58*

³¹ Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten*, (Jakarta: Djembatan dan KITLV, 1983), P. 58

- b. *Kapurban* adalah tempat tinggal Pangeran Prabu.
- c. *Kamandalika* adalah tempat tinggal Pangeran Mandalika.
- d. *Kawiragunan* adalah tempat tinggal Pangeran Wiraguna.
- e. *Kaloran* adalah tempat tinggal Pangeran Lor.
- f. *Kasunyatan* adalah tempat tinggal Ulama Istana.

Meskipun pada umumnya golongan elit yang tersebut diatas merupakan lapisan masyarakat yang jumlahnya terbatas, namun langkah-langkah yang diterapkan dalam kesultanan ini bersandar pada aneka kebijakan yang dibuat mereka. Pengaruh mereka terhadap kehidupan istana sangat besar, bahkan acapkali kebal terhadap tekanan politik. Hal itu menunjukkan bahwa selain dengan masyarakat non elit, sultan juga memiliki kedekatan pula dengan masyarakat elit yang tinggal di Banten.³²

C. Kondisi Politik

Secara Politis, Kesultanan Banten menjalankan politik luar negeri yang “bebas aktif”. Artinya Banten membuka pintu kepada siapa saja yang ingin menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten sendiri aktif membina hubungan baik dan kerja sama dengan berbagai pihak di sekitarnya atau di tempat yang jauh sekalipun, antara lain dengan Makasar, Bangka, Cirebon, Indrapura dan lainnya.³³

Misalnya dengan Cirebon, hubungan baik antar kesultanan sudah terjalin melalui pertalian keluarga. Kerjasama antara Banten dan Cirebon adalah kerjasama di bidang keagamaan, militer, dan diplomatik. Cirebon pernah membantu Banten dengan mengirim bantuan militer dalam rangka menduduki Kota Kerajaan Sunda. Begitupun sebaliknya, Banten pernah membantu Cirebon ketika membebaskan dua orang putra Panembahan Girilaya yang ditahan di Ibukota Mataram dan Kediri tahun 1677. Walaupun begitu, ketika terjadi

³² Untoro, *Kapitalisme Pribumi Awal... P. 55*

³³ Nina. H. Lubis, *Banten dalam Pergumulan Sejarah..., P. 50*

konflik antara Mataran dengan Banten, Cirebon selalu bersikap netral meskipun pada beberapa waktu salah satu pihak mendesak untuk memihak kepada mereka.³⁴

Di Banten, pemerintahan bersifat otokratik.³⁵ Kekuasaan raja bisa terbilang tak terbatas. Meskipun terdapat sebuah dewan yang bermusyawarah untuk mengambil keputusan-keputusan penting, namun pada pertengahan abad ke-17 sistem ini tidak berjalan lancar bahkan di tinggalkan terlebih terhadap hal-hal yang menyangkut tentang masalah pergantian raja. Sehingga akibatnya adalah Banten sering terjerumus dalam perang saudara ketika memilih penguasa baru.³⁶

Terkait struktur politik yang ada di Banten, puncak kekuasaan politik Banten dimiliki oleh seorang raja. Layaknya seperti kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah yang memakai gelar *Pangeran Ratu*, sebelum mengadopsi gelar *Sultan* sejak 1638. Tetapi dibantu dengan keberadaan dua perdana menteri yang disebut *Patih Jero* sebagai perdana menteri Internal, dan *Patih Jaba*, sebagai perdana menteri eksternal. Terkait fungsinya, patih jero berfungsi sebagai penasihat khusus, selain itu juga harus mengatur semua kepentingan internal kraton dan kerabat kerajaan terkait langsung atau tidak dengan birokrasi. Biasanya patih jero diangkat dari kalangan bangsawan dan bergelar *Mangkubumi*. Sedangkan fungsi patih jaba adalah mengatur serta mempunyai kewenangan secara luas untuk mengelola semua urusan luar termasuk kewenangannya dalam mengelola urusan perdagangan internasional, yang salah satu diantaranya adalah syahbandar. Dengan kedudukannya itu, patih jaba lazim di sebut dengan *Tumenggung* atau juga *Kiai Patih* yang merupakan kepanjangan tangan dari orang-orang asing di Banten. Tak seperti patih jero

³⁴ Nina Lubis, *Sejarah Banten...*, P.64

³⁵ *Otokratik* adalah pemerintahan atau pemimpin yang menghendaki segala kebijakan dan keputusan dari sebuah organisasi ada ditangannya. Bawahan hanyalah sebatas pelaksana tugas atau pelaksana seluruh perintah atasan yang bersifat harus ditaati dan tanpa ketaatan dapat dikatakan sebagai bentuk pembangkangan. (Ikot Sholehah, *Perdagangan Internasional, ...*, P.143)

³⁶ Claude Guillot, *Banten Sejarah dan peradaban...*, P.214

yang harus dari kalangan bangsawan, patih jaba bisa diangkat dari kalangan biasa yang mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dalam mengemban tugasnya.³⁷

Untuk menghadapi kompeni dalam politik dan militernya, Sultan Ageng Tirtayasa juga memperkuat pertahanannya dengan menjalin hubungan yang baik dan gencar melakukan ekspansi ke berbagai daerah.³⁸ diantaranya Sultan Ageng pernah mengirim beberapa utusan ke Eropa, seperti Kiyai Ngabehi Tumenggung Naya Wipraya dan Jaya Sedana yang dikirim sultan ke Inggris untuk menjalin hubungan kerja sama pada tahun 1681. Dari beberapa usahanya dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, akhirnya menghmbuhkan hasil yang manis. Dari kerjajaan Turki, Inggris, Perancis, dan Denmark, Banten banyak mendapatkan bantuan senjata api yang sangat dibutuhkan. Sultan juga melakukan penyatuan pasukan dari daerah kuasa Banten guna bergabung dengan pasukan Surosowan.³⁹

Dalam masalah politik kenegaraan, Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menentang segala bentuk penjajahan bangsa asing atas negaranya. Mengembalikan Jayakarta kembali ke pangkuan Banten merupakan cita-cita utama, dan karenanya sultan tidak pernah mau berbaikan dengan Kompeni Belanda. Sultan melihat bahwa perjanjian damai antara Sultan Abulmafakhir dengan kompeni pada tahun 1645 sudah tidak lagi di patuhi kompeni. Kompeni Belanda masih selalu mencegat kapal-kapal dagang asing yang hendak berlabuh dan mengandalkan transaksi dagang di Bandar Banten, sehingga Pelabuhan Banten banyak mengalami kerugian karena para pedagang asing segan berlabuh di Banten dengan alasan takut diserang kapal-kapal kompeni baik waktu datang, maupun setelah mereka meninggalkan Banten.

³⁷ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka Budaya...*, P. 18-19

³⁸ Bernard. H.M. Vlekke, *Nusantara, Sejarah ...*, P.164

³⁹ Halwany Michrob dan Mudjahid Chudari, *Catatan Masa Lalu Banten* (Serang: Saudara Serang, 1993), P. 143-144

Membalas tindakan kompeni ini, sultanpun memerintahkan tentaranya untuk selalu mengadakan permusuhan pada instansi milik kompeni di mana saja, dengan harapan orang-orang Belanda itu segera meninggalkan Banten. Sultan memperkuat pasukannya di Tangerang dan Angke yang telah lama di jadikan benteng pertahanan terdepan dalam menghadapi kompeni Belanda, dan dari daerah ini pulalah pada tahun 1652 pasukan Banten mengadakan penyerangan ke Batavia.⁴⁰

Kondisi sosial politik Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa diakhiri dengan konflik antara dirinya dan puteranya, Sultan Haji. Banten mengalami perpecahan dari dalam ketika Sultan Haji yang terhasut Belanda dan begitu ambisius ingin cepat naik tahta hingga akhirnya menjalin persahabatan dan perlindungan dari kompeni Belanda. Praktis semua rakyat Banten mendukung Sultan Ageng dan menentang Sultan Haji. Sultan Ageng juga melakukan perlawanan terhadap sultan Haji dan sekutunya, tetapi pasukan Sultan Ageng tak kuasa menahan serangan kompeni. Akhirnya, Banten dapat di taklukan dan Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditawan.⁴¹

Ketidakberdayaan Sultan Ageng dalam menghadapi kekuatan militer Belanda pada tahun 1682 adalah cerita lain dari episode sejarah Banten. Tetapi, kekalahan Banten itu harus di catat sebagai sebuah perjuangan hidup-mati untuk mempertahankan prinsip bahwa kedaulatan Banten sejauh Cisadane di timur hingga Anyer di pesisir barat telah di tentukan oleh integritas masyarakat ke dalam semangat trilogi pembangunan yang mempersatukan berbagai ikatan genealogis, semangat keagamaan, dan kekuatan agraris dalam sistem sosial dan ekonomi politik yang berimbang antara kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyatnya di seluruh wilayah Banten.⁴²

⁴⁰ Halwany Michrob, *Proses Islamisasi di Banten, Cuplikan buku catatan masa lalu banten*, (Serang: Saudara Serang, 1993) P.92

⁴¹ Bernard. H.M. Vlekke, *Sejarah Indonesia...*, P. 168

⁴² Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka Budaya...*, P.28

D. Kondisi Ekonomi

Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 menyebabkan terjadinya penyebaran pusat-pusat perdagangan dan beralihnya kegiatan pedagang-pedagang Islam dari Malaka yang dahulu adalah satu-satunya pusat perdagangan di Nusantara bagian barat. Setelah itu, sebagian pusat perdagangan menyebar ke bagian utara yaitu Aceh, dan Sebagian lagi ke selatan yaitu Banten. Selain letaknya yang strategis, ekspor lada dari Banten juga memiliki daya Tarik yang kuat, hingga Portugis sendiri harus mengadakan hubungan dagang dengan Banten.⁴³

Lada sebagai komoditas utama perdagangan internasional di Banten ini sudah berakar dari zaman Maulana Hasanuddin, yang mana lada ini diambil dari daerah Banten sendiri dan daerah yang berada di bawah kekuasaan Banten, yaitu jayakarta, Lampung, dan yang terjauh yaitu Bengkulu.⁴⁴ Banyak pedagang asing yang datang ke Banten untuk mencari lada.⁴⁵

Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, ia berusaha sungguh-sungguh untuk mengembalikan Banten sebagai negara yang berkuasa dalam hal perdagangan seperti dahulu. Untuk mewujudkan cita-citanya dalam mengembalikan kejayaan dan kemakmuran Banten, Sultan Ageng memusatkan usahanya dengan dua cara yaitu memajukan dan memperluas perdagangan Banten dengan meluaskan daerah kekuasaannya dan mengusir Belanda dari Batavia yang menurutnya merupakan sumber kemunduran Banten.

Untuk mewujudkan cita-citanya, Sultan Ageng harus mematahkan sistem monopoli Belanda terlebih dahulu, karna sistem itulah yang menutup pintu perdagangan dimanapun. Maka dari itu, Banten membuka kembali bagi semua bangsa yang ingin menjalin hubungan perdagangan dengannya. Berbeda dengan VOC yang menggunakan sistem monopoli, maka sistem ekonomi dan

⁴³ A. Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan-Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: penerbit Ombak, 2012) P. 236-237

⁴⁴ Nina Lubis, *Sejarah Banten...*, P.47

⁴⁵ Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya...* P. 59

perdagangan di Banten menggunakan sistem perdagangan bebas. Aturan-aturan perdagangan yang dibuat lebih memuaskan bagi pedagang-pedagang asing, terutama bagi pedagang-pedagang Eropa. Kehadiran pedagang-pedagang Eropa itu memberi keuntungan dan kekayaan, terutama Inggris, dapat memberikan dukungan dalam menghadapi Belanda. Pedagang-pedagang India, Cina, Arab dan Eropa kemudian datang membanjiri Pelabuhan Banten setelah mereka diusir oleh Belanda dari Malaka dan Makassar. Banten pada masa itu benar-benar mampu mengembalikan peranan perdagangannya.⁴⁶

Sistem ekonomi politik dan perdagangan bebas Kesultanan Banten lahir akibat meningkatnya kegiatan ekonomi. Kebijakan politik tersebut dibuat berlandaskan ekonomi, sehingga Banten menetapkan bahwa semua bangsa asing harus mempunyai wakil dalam pemerintahan, wakil-wakil tersebut merupakan para pedagang di Banten. Peraturan ini juga dikenakan pada bangsa-bangsa Eropa, peran sebagai penjamin dan wakil bangsa asing sendiri dijabat oleh kepala loji.⁴⁷ Kata loji sendiri berasal dari bahasa Belanda, dapat diartikan dengan fasilitas bangunan kantor yang juga di gunakan sebagai toko dan gudang bagi pedagang asing.⁴⁸

Pada masa Sultan Ageng berkuasa, elit ekonomi kota terbagi menjadi dua kelompok besar. Di satu sisi adalah kelompok pedagang yang tentu saja hanya berfikir untuk mengembangkan perdagangan dan mengesampingkan semua intervensi politik. Kelompok pedagang hanya memandang penting tentang produk *importable* dan *exportable*. Sedangkan di sisi lain kaum bangsawan memiliki visi berbeda dengan selalu memikirkan masalah pertanian.

Menghadapi kondisi itu, Sultan Ageng kemudian mengambil kebijakan tegas yang menguntungkan semua pihak dengan cara tetap menghidupkan perdagangan, tetapi diperkuat dengan pertahanan pangan dalam negeri. Kebijakan ekonomi pasar kemudian diserahkan kepada orang Tionghoa yang

⁴⁶ A. Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam ...*, P. 242-244

⁴⁷ Ikot Sholehah, *Perdagangan Internasional, ...*, P. 119

⁴⁸ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka ...*, P.207

kompeten, yaitu yaitu Syahbandar Kaytsu dan Cakradana untuk mengefektifkan perdagangan maritim Banten. Sedangkan dalam oprasionalisasi kebijakan pertaniannya, Sultan Agenglah yang mengelola dan memegang kendali Banten agar menjadi negara yang juga *agraris*. Saat ini bahkan tidak ada yang menyangkal bahwa selama 30 tahun berkuasa, Sultan Ageng telah berhasil mewujudkan idealisme untuk mencapai sebuah “harmoni sosial” di seluruh teritorial Banten. Kebijakan sultan telah mampu merealisasikan sebuah tipe masyarakat yang sinergis dalam sebuah negara agraris yang diidealkan memiliki kearifan lokal menghadapi persaingan ekonomi global pada akhir abad ke XVII.⁴⁹ Atas segala pencapaian yang diraih, Reid menulis, Sultan Ageng dari Banten adalah perwujudan dari semangat independensi usaha perdagangan dan inovasi teknologi, terutama sebelum dihancurkan oleh VOC.⁵⁰

Sebagai sebuah negeri yang sumber penghasilannya sebagian besar bertumpu pada perdagangan, maka di Kesultanan Banten terjadi aneka ragam pertukaran baik berupa barang maupun jasa. Barang yang di perjual belikan pun beragam, ada yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Secara geografis, kondisi perdagangan di Banten meliputi tiga jenis, yaitu *perdagangan lokal*, *regional*, dan *internasional*. Batasan wilayah tersebut karna dilandasi oleh perbedaan jangkauan wilayah perdagangan yang termasuk dalam kekuasaan Kesultanan Banten.

Perdagangan lokal adalah proses jual beli berbagai barang yang berasal dari dalam maupun luar Banten namun berlangsung di Kesultanan Banten. Sedangkan *regional* adalah jual beli yang terjadi di luar Kawasan Kota Banten, namun termasuk ke dalam kekuasaan kota ini. Sedangkan *perdagangan internasional* diartikan dengan jual beli barang yang berlangsung di luar

⁴⁹ Juliadi, dkk, *Ragam Pusaka ...*, P. 27-28

⁵⁰ Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga, ...*, P. xxv

kawasan kekuasaan Kesultanan Banten, seperti antara Banten dengan beberapa daerah dan negeri lain.⁵¹

Meskipun perdagangan yang berlangsung di Kesultanan Banten pada masa lalu memperlihatkan perbedaan yang jelas antara ketiga batas wilayah tersebut, namun rangkaian kegiatan perdagangan yang dapat mewujudkan aktifitas itu meliputi tiga pihak yang sama, yaitu produsen, distributor dan konsumen. Bertolak pada sebaran barang yang dibuat di dalam maupun luar kesultanan, maka aliran barang tersebut menunjukkan pertukaran barang melalui sistem ekspor dan impor.

Ekspor dan impor merupakan mekanisme pemenuhan kebutuhan barang dan jasa lintas wilayah yang mengaitkan wilayah produksi dan konsumen melalui pola-pola distribusi tertentu. Yang dimaksud perdagangan ekspor adalah penjualan barang-barang ke luar wilayah Kesultanan Banten baik berupa hasil pertanian maupun non pertanian. Sebaliknya perdagangan impor diartikan dengan penjualan barang-barang yang di datangkan dari luar wilayah kekuasaan Kesultanan Banten, baik berupa bahan makanan, atau peralatan yang terjadi di dalam Kesultanan Banten.⁵²

Komoditas ekspor terbesar dari Kesultanan Banten adalah lada. Jumlahnya yang berlimpah, menjadikannya di perdagangkan sebagai komoditas ekspor utama. Jumlah komoditas lain tidak sebanyak komoditas lada, bahkan penjualan lada ini sudah berlangsung sejak awal masa kesultanan dan distribusinya meluas hingga ke Eropa. Berdasarkan hal tersebut, maka penjabaran jejak tentang jual beli lada ini dapat lebih diketahui ketimbang komoditas lain. Walaupun tidak banyak, namun di jumpai pula penjualan barang dari hasil non pertanian yang turut meramaikan jalannya perdagangan ekspor di masa lampau.⁵³

⁵¹ Untoro, *Kapitalisme Pribumi Awal...*, P.113

⁵² Untoro, *Kapitalisme Pribumi...*, P. 114

⁵³ Untoro, *Kapitalisme Pribumi...*, P. 115

Upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup bagi masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, pemerintah Kesultanan Banten ternyata banyak mendatangkan aneka barang dari berbagai tempat. Ada yang didatangkan karna memang Kesultanan Banten tidak memiliki sumber daya barang tersebut, namun ada pula yang dibeli dari luar Banten meskipun kesultanan ini memproduksi barang yang sama. Tindakan tersebut diperkirakan terjadi karna jumlah produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Secara sepintas, barang-barang yang diimport tersebut terpilah menjadi empat macam barang dagangan, diantaranya adalah bahan pangan, sandang, berbagai macam peralatan dan bahan baku, dan juga budak. Keempat komoditi itu di datangkan dengan berbagai cara, yaitu dengan mengadakan hubungan resmi dagang langsung antar negara, atau antar pemerintahan Banten dengan pedagang besar di negara lain, atau antar pedagang di Kesultanan Banten dengan pedagang dari luar Banten.⁵⁴

Perdagangan yang terjadi di Kesultanan Banten juga bukan hanya berupa barang, tetapi berlangsung pula jual beli jasa. Bedanya, jika jual beli barang memiliki wujud, perdagangan jasa adalah alat guna pemenuhan kebutuhan manusia yang tak berwujud, tetapi berupa tenaga kerja berbentuk pelayanan. Di Kesultanan Banten, tenaga kerja jasa tersebut diantaranya adalah tenaga kerja yang terlibat dalam struktur pemerintahan kesultanan seperti pekerja pembuat bangunan, tenaga administrasi kesultanan serta penjual jasa lainnya yang terkait dengan perdagangan dan lainnya.⁵⁵

Pemerintah Kesultanan Banten juga banyak melakukan upaya guna menunjang perdagangan yang berlangsung di negerinya. Upaya tersebut terwujud dalam bentuk bangunan fisik dan non fisik. Yang termasuk kategori sarana penunjang ekonomi fisik adalah pasar, pelabuhan, dan transportasi. Sedangkan moneter dan peraturan yang terkait perdagangan termasuk dalam

⁵⁴ Untoro, *Kapitalisme Pribumi...*, P. 159-160

⁵⁵ Untoro, *Kapitalisme Pribumi...*, P. 208

kategori non fisik. Pemenuhan kebutuhan akan berbagai sarana penunjang ekonomi ini akan sangat menopang jalannya berbagai aktifitas ekonomi di Kesultanan Banten.⁵⁶

⁵⁶ Untoro, *Kapitalisme Pribumi...*, P.225

